

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP HARTA
WARISAN SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA
(AFWEZIGHEID)**



**Disusun Oleh :
HARYADI SUTANTO
NIM : 12215015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2017**

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN
SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA (AFWEZIGHEID)

Oleh :
HARYADI SUTANTO

ABSTRACT

The intended national and planned legacy of national heritage is based on Islamic Law, Customary Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). The purpose of this paper is to know how the determination, position and legal consequences of the allegedly dead or the absent (afwezigheid), as well as legal protection for his heirs according to Civil Law. The determination by the District Court of "afwezigheid" in the perspective of the Inheritance Law of the Inheritance of the Inherited Law, if 5 (five) years have passed since the departure of the absent from his residence, may apply to the District Court. The District Court shall examine and call to the absentee, and if the absentee does not appear / present without authorizing a representative, the District Court shall make a general summonment for a period of at least 3 (three) months (467 BW). If the absentee is not present, the District Court will determine that the absentee is suspected to have died. It is by this determination that the heirs can control the inheritance of the absentee and, if necessary, the moment left behind, may establish a new marriage with another person (495 BW).

ABSTRAK

Hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan dan yang sedang direncanakan dewasa ini bersumber pada Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara penetapan, kedudukan dan akibat hukum dari orang yang diduga meninggal dunia atau si yang tidak hadir (*afwezigheid*), serta perlindungan hukum untuk ahli warisnya menurut Hukum Perdata. Penetapan oleh Pengadilan Negeri tentang “*afwezigheid*” dalam perspektif Hukum Waris Perdata, yaitu mereka sebagai ahli waris yang berkepentingan, apabila 5 (lima) tahun telah lewat semenjak kepergian si yang tidak hadir dari tempat tinggalnya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri akan memeriksa dan melakukan pemanggilan kepada si yang tidak hadir, dan apabila si yang tidak hadir tidak datang/hadir tanpa memberi kuasa kepada seorang wakil, maka Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan secara umum dalam jangka waktu selama sedikitnya 3 (tiga) bulan (pasal 467 BW). Jika si yang tidak hadir/wakilnya tetap tidak hadir, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan bahwa si yang tidak hadir diduga telah meninggal dunia. Dengan penetapan itulah ahli waris dapat menguasai harta warisan dari si yang tidak hadir dan jika diperlukan saat itu yang ditinggalkan dapat melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain (pasal 495 BW).

Kata Kunci : Hukum Waris Perdata, Keadaan Afwezigheid



KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah Bapa di Surga dan dalam nama Yesus Kristus putra Bapa atas rahmatnya yang diberikan kepada saya, sehingga tesis saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (*Afwezigheid*)” dapat terselesaikan.

Tesis ini saya tulis sebagai syarat atas kelulusan dalam menempuh pendidikan Strata 2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama. Berakhirnya tesis ini tidak lepas dari dukungan orang di sekitar saya, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Narotama Hj. Rr Iswachyu Dhaniarti DS., S.T., M.HP., yang telah memberikan saya fasilitas dan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Narotama.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga saya mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak / Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, yang dengan sabar telah mengajar saya dan memberikan ilmu yang setinggi-tingginya kepada saya.
5. Dosen pembimbing Dr. Henny Tanuwidjaja, SH.,Sp.N.,M.H yang telah dengan sabar membimbing saya dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya.
6. Ibu Kus, yang telah dengan sabar menuntun saya dan tidak lelah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Orang Tua, yang telah memberikan dukungan moral sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kakak-kakak saya, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Theresia Sindy, yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Perpustakaan Universitas Narotama dan Perpustakaan Umum Daerah, yang telah meminjamkan buku-buku pedoman dalam pengerjaan tesis ini sehingga terselesaikan dengan baik.
11. PT. Sentra Sukses Solusindo, yang telah memberikan saya dukungan selama pengerjaan tesis ini.

Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam pengerjaan tesis ini, tetapi tidak dapat disebutkan namanya di atas, semoga amal dan kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata dari saya, Tiada Gading Yang Tak Retak, begitu juga dengan tesis ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tesis ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pembaca, dan saya akan tetap menerima segala macam masukan dari para pembaca. Terima Kasih.

Surabaya, September 2017

Haryadi Sutanto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Originalitas Penelitian.....	8
6. Tinjauan Pustaka.....	11
6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
6.2. Konsep Waris B.W.....	13
6.3. Konsep <i>Afwezigheid</i> / Si Yang Tidak Hadir / Dugaan Hukum Meninggal Dunia	15
6.4. Akibat Hukum Pewarisan Karena <i>Afwezigheid</i>	18
7. Metode Penelitian	19
7.1 Tipe Penelitian.....	19
7.2 Pendekatan Masalah.....	19
7.3 Sumber Bahan Hukum	20
7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	21
7.5 Analisis Bahan Hukum.....	21
8. Sistematika Penulisan	21

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK*24

2.1. Konsep Hukum Waris Menurut BW	24
2.2. Ketentuan-Ketentuan Dalam Pewarisan BW	31
2.3. Hukum Waris BW dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	48
2.3. Perlindungan Hukum Ahli Waris Menurut BW	52

BAB III : AKIBAT HUKUM KEADAAN *AFWEZIGHEID* TERHADAP
HARTA PERKAWINAN YANG DITINGGALKAN KEPADA
AHLI WARISNYA57

3.1. Keadaan <i>Afwezigheid</i> / Dugaan Hukum Meninggal Dunia / Keadaan Tidak Hadir oleh Penetapan Pengadilan	57
3.2. Pewarisan Karena <i>Afwezigheid</i>	68
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Warisan Pewaris " <i>Afwezigheid</i> "	76
3.4. Akibat Hukum Keadaan <i>Afwezigheid</i> Terhadap Perkawinan	80
3.5 Akibat Hukum Kembalinya Si Yang Tidak Hadir Terhadap Harta Benda	93

BAB IV : PENUTUP103

4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penulisan di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Hak ahli waris untuk menerima harta pewaris yang meninggal dunia mendapatkan perlindungan hukum secara adil sesuai bagiannya masing-masing dari jumlah ahli waris yang ada, dan harta warisan yang akan dibagi. Dalam hal ini pembagian warisan juga harus memperhatikan *Legitime Portie* masing-masing ahli waris.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris terhadap pewaris yang “diduga meninggal dunia” adalah dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, yaitu setelah lewat 5 (lima) tahun tidak ada kabar dan tidak meninggalkan pesan atau kuasa (pasal 467 BW), atau 10 (sepuluh) tahun apabila si yang tidak hadir meninggalkan kuasa dan kuasa tersebut telah daluwarsa karena lewatnya waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 470 BW). *Afwezigheid* bisa dimohonkan penetapan pengadilan oleh si yang berkepentingan dengan maksud :
 - a) Tentang harta tetap dari si yang tidak hadir
 - b) Tentang permohonan untuk melakukan perkawinan ke-2 (dua)

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran :

1. Bahwa suatu peristiwa *afwezigheid* bagi ahli waris yang berkepentingan harus mendapat keabsahan melalui penetapan pengadilan, sehingga saya berharap agar penegak pengadilan lebih teliti memahami makna dan tujuan *afwezigheid*, agar ahli waris yang mengalami keadaan *afwezigheid* mendapatkan keadilan untuk mengatasi masalah harta warisannya.
2. Peristiwa *Afwezigheid* bukan hanya dialami oleh “orang” saja tetapi juga dapat dialami oleh suatu Badan Hukum, oleh karena itu bagi ahli waris / pengurus suatu Badan Hukum yang berkepentingan juga harus mendapatkan keabsahan penetapan pengadilan, sehingga dengan penulisan ini diharapkan penegak hukum dapat lebih memahami makna dan tujuan suatu penetapan yang adil tentang *afwezigheid* bagi ahli waris dari suatu badan hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2013.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan : Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet. 2, Nuansa Cendekia dan Nusamedia, Bandung, 2013.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Mandar Madju, Bandung, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hadjon, Philpus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hartojo, *Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Waris Barat)*, Gadiza Utama, Jakarta Utara, 2013.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Cet. 5, Tintamas, Jakarta, 1983.
- Kie, Tan Thong, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmut, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Mourik, Van, *Studi Kasus Hukum Waris*, Eresco, Bandung, 1993.

Mudiarti, Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007.

Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-12, 2014.

Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979.

Poesponoto, K.N.G Soebakti, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Poewardarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1993.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan ke 2, Alumni, Bandung, 1982.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2001.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Antar-Golongan di Indonesia*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1952.

-----, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravenage Vorkink Van Hove, Bandung, 1962.

-----, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan 5, Jakarta, 2012.

Pudjosubroto, R. Santoso, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

-----, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Rasjidi, Lili dan LB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian 1 Persoon Alamiah*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Hukum Harta Perkawinan*, Acitra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, 1966.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Intermasa, Jakarta, 2003.

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015

Susanto, D, *Hukum Waris Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.

Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2012.

Van der Burght, Gregor, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, terjemahan F. Tengker, Cet. 1, Bandung, 1995.

DESERTASI DAN TESIS

Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Asari, Imam, *Kedudukan Kedudukan Orang Hilang Dalam Perspektif Kewarisan KUHPerdara (BW) dan Hukum Kewarisan Islam*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Mataram, 2012.

Astawa, Anak Agung Putra, *Hilangnya Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hassanudin Makasar, 2012.

Hidayati, Heppy Setyo, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2015.

S,Rusdianto, *Prinsip Negara Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonom Khusus atau Istimewa*, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016

JURNAL

Andayani, Isetyowati, *Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*, Jurnal Hukum, Perspektif volume X No.4, 2005.

Bedner, Adriaan dan Stijn Van Huis, *Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*, Utrechth Law, International Jurnal, 2010.

Tanuwidjaja, Henny, *Pewarisan Afwezigheid/Keadaan Tidak Hadir dan Pewarisan Perkawinan Kedua Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Naskah Jurnal Hukum, yang diterbitkan Universitas Katholik Satya Wacana 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Yurisprudensi yang berkaitan dengan *Afwezigheid*

